



PEMERINTAH
KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENJA

RENCANA KERJA

Tahun 2026

APIP
Mengawal Akuntabilitas
Pengolahan Keuangan Dan
Pembangunan Kabupaten
Kutai kartanegara



inspektorat.kukarkab.go.id



inspektorat@kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fax 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-406/ITDA/SET.II/000.8.3/01/2025

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka setiap entitas akuntansi wajib menyusun dokumen perencanaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dengan Surat Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : a. Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini bertugas antara lain :

1. Menyiapkan bahan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah;

3. Menyusun

3. Menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat yang berisi program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan;
- b. Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berlaku dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) beserta Perubahan Tahun 2026; (Terlampir)

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 9 Januari 2025

INSPEKTUR,


H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-406/ITDA/SET.II/000.8.3/01/2025
TANGGAL : 9 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2026

SUSUNAN TIM

A. Pengarah	: Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara
B. Penanggung Jawab	: Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
C. Ketua	: Inspektur Pembantu Wilayah III
D. Wakil Ketua	: 1. Inspektur Pembantu Wilayah I 2. Inspektur Pembantu Wilayah II 3. Inspektur Pembantu Wilayah IV
E. Sekretaris	: Kepala Subbag. Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
F. Anggota	: 1. Perencana Muda Sub Koordinator Penyusunan Program & Keuangan 2. Perencana Muda Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan

INSPEKTUR,


H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197908012001121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026. Rencana Kerja ini memuat indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Selain itu RENJA ini juga sudah menyesuaikan dengan rancangan Awal RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk priode 2025-2029.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi pengawasan sehingga rencana kerja Inspektorat Daerah diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam satu tahun ke depan. Perubahan paradigma Inspektorat Daerah saat ini dengan menjalankan fungsi *quality assurance* atau Penjamin Mutu dan consulting patner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *early warning system* atau sebagai peringatan dini. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa watch dog saat ini Inspektorat daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak perlu disempurnakan, meskipun demikian kami berharap dengan rencana kerja ini semua kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang kami buat mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman selanjutnya.

Tenggarong, Juli 2025
Inspektur,


H. Heriansyah, SE., M.Si., CGCAE., CPSp
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH.....	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH	59
4.1 Program Dan Kegiatan	59
4.1.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.	59
4.1.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan ..	60
4.1.3 Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya	60
4.1.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	61
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	74
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	74
5.3 Rencana Tindak Lanjut	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara	11
Tabel 2. 2 TC – 30 Pencapaian Kinerja Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	29
Tabel 2. 3 TC – 31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara	35
Tabel 2. 4 TC – 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara	50
Tabel 4. 1 TC – 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Inspektorat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara	62

BAB I PENDAHULUAN

Dinamika perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan mengarah pada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber dana pembangunan yang jumlahnya terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Inspektorat sebagai Instansi yang melakukan Pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah (PD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana saat ini Kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat, pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*.

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sebagai prinsip dasar dari **Good Governance** Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat periode 2021-2026, serta memperhatikan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah periode 2025-2029.

Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat Daerah dalam perencanaan kinerja merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang, dan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang

dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Landasan hukum penyusunan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya.

Dalam Rencana Kerja ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya dapat dilakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah:

- (1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

- (2) Menyesuaikan dengan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029.
- (3) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (2) Sebagai satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pelaksanaan tugas – tugas Pembinaan dan Pengawasan.
- (4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan gambaran umum tentang perlunya penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.1 Latar Belakang

Menyajikan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Inspektorat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja, keterkaitan antara Rencana Kerja Inspektorat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis Inspektorat Daerah, dengan RENJA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan terkait sebagai berikut :

4.1 Program dan Kegiatan.

Menyajikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel 4.1 (TC-33) Rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian penutup, berupa :

- 5.1 Catatan Penting dalam penyusunan RENJA.
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.
- 5.3 Rencana Tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah adalah penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan penyusunan program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah dalam mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja output dan pencapaian kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Untuk pencapaian dari masing-masing Program kegiatan tahun 2024 telah dijabarkan pada penjelasan dibawah ini.

Program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran yang disediakan untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah APBD Perubahan adalah

sebesar Rp.58.686.558.938,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.47.078.757.984,- atau tercapai 80,2 %.

Sedangkan untuk capaian kinerja dari program ini yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target nilai 85 hasil evaluasi implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang dilakukan penilaian pada tahun 2024 memperoleh nilai 73,64 dengan kategori BB (Sangat Baik). Kategori "Sangat Baik" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Pencapaian ini dapat dilakukan dengan dilaksanakan kegiatan dalam program ini sesuai rencana dengan kerjasama semua pihak yang terkait demi pencapaian kinerja. Selain yang mencakup Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah kemudian tercapainya target Penilaian Kapabilitas APIP ke Level 3 dari Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri oleh BPKP yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Pagu Perubahan yang disediakan pada program ini sebesar Rp.11.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.808.467.577,- atau mencapai 41,8%. Untuk indikator kinerja Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan yang ditargetkan 96% dengan realisasi 103%.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Pagu Anggaran Perubahan yang disediakan untuk program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp.4.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.649.242.765,- atau mencapai 41,20%.

Sedangkan untuk Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan target 75% Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP tercapai 97,2 % melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Kegiatan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan sesuai rencana dengan kerjasama semua yang terkait dan

juga adanya Komitmen Perangkat Daerah diantaranya dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana Pencapaian Evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh BPKP telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi), juga dalam Penilaian MCP (Monitoring Center for Prevention), Pencapaian Target LHKASN, serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Secara keseluruhan untuk Program pada tahun 2024 memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, hanya saja untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak dilaksanakan karena masih belum ada yang mendesak untuk di pelihara. Rendahnya realisasi 2 program utama Insepktorat disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Komponen belanja terbesar untuk kedua program inti tersebut adalah belanja perjalanan dinas dalam kota, dimana satuan biaya harian dan transportasi yang rendah sehingga realisasinya juga rendah.
2. Keterbatasan jumlah APIP dan hari/waktu untuk melaksanakan penugasan, sehingga cakupan pengawasan juga tidak bisa dilaksanakan semaksimal mungkin.
3. *Mandatory spending* yang cukup besar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undang untuk pelaksanaan pengawasan sebesar 0,5% dari total APBD, yang tidak sesuai dengan proporsi jumlah SDM APIP selaku pengguna realisasi anggaran tersebut.

Berikut disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.1 TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Inspektorat Daerah

Lembar :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6.01	Inspektorat Daerah									
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 Nilai	84,9 Nilai	85 Nilai	73,64 Nilai	86,64	88 Nilai	88 Nilai	98
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	100	3 Level	3 Level	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	30 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	11 Dokumen	25 Dokumen	83,33
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	14 Dokumen	70
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	Laporan	-
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	8 Laporan	80

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	Dokumen	-
6.01.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	-	-	-	-	1 Berita Acara	Berita Acara	-
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan	1209 Orang/bulan	1260 Orang/bulan	1133 Orang/bulan	89,92	1176 Orang/bulan	1133 Orang/bulan	89,92

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	Dokumen	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	Dokumen	-
6.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	Laporan	-
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100	-	1 Paket	50
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	181 Orang	100 Orang	171 Orang	171	50 Orang	402 Orang	268
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	155 Orang	90 Orang	90 Orang	100	75 Orang	320 Orang	182,86

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	224 Orang	160 Orang	222 Orang	138,75	55 Orang	501 Orang	286,29
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	100	6 Layanan	6 Layanan	100
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	16

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	8 Paket	100
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	50 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	100	50 Laporan	190 Laporan	76
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.250 Dokumen	250 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	100	350 Dokumen	1350 Dokumen	108

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400 Unit	168 Unit	303 Unit	301 Unit	99,34	37 Unit	506 Unit	126,5
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100	-	6 Unit	120
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	7 Unit	11 Unit	11 Unit	100	-	18 Unit	225
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	400 Unit	155 Unit	290 Unit	288 Unit	99,31	36 Unit	479 Unit	120
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	18 Unit	18 Unit	15 Unit	13 Unit	86,7	15 Unit	15 Unit	83,33
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	86

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	75
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	- Unit	-	2 Unit	2 Unit	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	97 Persen	168 Persen	96 Persen	103,66 Persen	108	96 Persen	123 Persen	127
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan	70 Dokumen	71 Dokumen	97 Dokumen	99 Dokumen	102	70 Dokumen	99 Dokumen	141
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	4 Laporan	28 Laporan	30 Laporan	107,1	3 Laporan	3 Laporan	100
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	15 Laporan	93,75	16 Laporan	16 Laporan	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	41 Laporan	40 Laporan	41 Laporan	103	38 Laporan	38 Laporan	100
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	9 Kesepakatan	- Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	100	3 Kesepakatan	6 Kesepakatan	67
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19 Dokumen	45 Dokumen	19 Dokumen	20 Dokumen	105	19 Dokumen	19 Dokumen	100
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25	4 Laporan	4 Laporan	100
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	41 Laporan	15 Laporan	19 Laporan	126,7	15 Laporan	15 Laporan	100
06:01:03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	100 Persen	65 Persen	75 Persen	97,2 Persen	129,6	85 Persen	82,4 Persen	82,4
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	83 Dokumen	83 Dokumen	83 Dokumen	80 Dokumen	96,4	85 Dokumen	83 Dokumen	100
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	100	58 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	77	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	100
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal Penyusunan RENJA tahun 2024 telah menargetkan 82% untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, sedangkan realisasinya adalah sebesar 90,11%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan.

Untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP juga mengalami peningkatan karena realisasinya melampaui yang ditarget 74% tingkat penyelesaiannya menjadi 82,69%.

Persentase Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, target tidak terpenuhi dari yang ditargetkan 94 % tercapai 86,67%, Hal ini terjadi karena adanya Laporan yang terbatas waktu penanganan (Pengaduan Lelang), sedangkan tenaga pengawas yang kompeten menangani sedang dalam tahap penugasan yang bersamaan, dan adanya pengaduan yang masuk diakhir tahun sehingga terbatas waktu untuk melaksanakan tindaklanjut.

Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah mencapai target yang telah ditetapkan, yakni dari 3 Nilai yang ditargetkan dengan capaian 3 Nilai, ini berdasarkan evaluasi atas penerapan SPIP di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, skor Maturitas SPIP Terintegrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 3,371 sehingga memperoleh Level 3 (Terdefinisi). Capaian level tersebut adalah hasil dari penilaian pada beberapa komponen yaitu: 1) Penilaian atas komponen penetapan tujuan; 2) Penilaian atas komponen struktur dan proses; 3) Penilaian atas komponen pencapaian tujuan.

Tabel 2. 2 TC – 30 Pencapaian Kinerja Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA – PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	80	82	84	86	89,22	90,11	84	86	Target Terpenuhi
			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	71	74	77	79	76,94	82,69	77	79	Target Terpenuhi
			Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	92	94	96	98	82	86,67	96	98	Target Belum Terpenuhi, Karena ada laporan masuk di akhir tahun

NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA – PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	4	3	3	3	4	Target Terpenuhi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur Pengawasan dan Pembinaan bagi Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara maka isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 5 tahun kedepan antara lain:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh antara lain:
 - a) Membantu Bupati dalam Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah;
 - b) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia adalah dengan melaksanakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Adanya Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) peran Inspektorat adalah mengawal pelaksanaan kegiatan yang terkait persiapan pembangunan ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Masih kurangnya respon Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
5. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan perangkat daerah;
6. Identifikasi resiko dan penilaian resiko belum maksimal dilaksanakan terutama terhadap program dan kegiatan di perangkat daerah;
7. Belum optimalnya manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya Good Governance;
8. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Terkait dengan kinerja penyelenggaraan publik, Inspektorat Daerah juga memiliki tugas pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembinaan ini menjadi salah satu hal yang sangat mengemuka terutama dengan semakin sadarnya publik

akan kualitas pelayanan yang mereka terima dari penyelenggara pelayanan publik.

Selain isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah, yaitu:

1. Faktor Internal

- a. Terbatasnya aparatur pengawas dibandingkan cakupan luasan wilayah dan obyek pengawasan, dimana Dengan Luasan wilayah Pengawasan dan jumlah Auditan yang terdiri dari 38 Perangkat Daerah, 20 Kecamatan, 193 Desa, dan 32 Puskesmas serta 3 Rumah sakit sebagai pelaksana BLUD, juga lebih dari 500 Sekolah sebagai penerima Dana BOS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi kegiatan Pengawasan / pembinaan yang dilaksanakan Inspektorat dalam rangka mengemban amanat pengawasan yang dituangkan dalam Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri pada point Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.
- b. Selain itu adanya permasalahan yang semakin kompleks dan beragam serta perubahan peraturan yang berlaku, mewajibkan Inspektorat harus mempersiapkan Sumber Daya Aparatur pengawas yang profesional dan handal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pembinaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga memerlukan anggaran yang cukup untuk mengikuti Diklat Penjenjangan maupun Diklat teknis yang terkait dengan Pengawasan.

2. Faktor Eksternal

- a. Belum maksimalnya penerapan SPIP di OPD dimana adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan merupakan indikator bahwa SPIP belum diterapkan / diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi OPD.
- b. Masih tidak optimalnya respon Perangkat Daerah terhadap penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, maupun Hasil Pemeriksaan APIP.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai Consultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan Hasil analisis Kebutuhan Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Pada program ini ada beberapa kegiatan yang sub kegiatannya tidak teranggarkan dikarenakan efisiensi anggaran, adapun kegiatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja dikarenakan efisiensi anggaran, adapun sub kegiatan tersebut antara lain:

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - c. Reviu Laporan Kinerja.
 - d. Reviu Laporan Keuangan.
 - e. Pengawasan Desa.
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal.
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja dikarenakan efisiensi anggaran, adapun sub kegiatan tersebut sebagai berikut:
- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan.
- Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja dikarenakan efisiensi anggaran, adapun sub kegiatan tersebut adalah:
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
- 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
- Pada kegiatan ini ada beberapa sub kegiatan telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja dikarenakan efisiensi anggaran, adapun sub kegiatan tersebut sebagai berikut:
- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel 2. 3 TC – 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,99 Nilai	37.879.247.807	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,99 Nilai	37.879.247.807	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	350.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	350.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000	-
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	-
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Berita Acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Berita Acara	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 Laporan	18.051.055.063	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 Laporan	18.051.055.063	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/bulan	17.771.724.663	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/bulan	17.771.724.663	Perlu Penambahan Pagu Penyesuaian Jumlah ASN

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	-
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	204.330.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	204.330.400	-
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD Inspektorat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD Inspektorat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.800.000	
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	-
11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000	-
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepengawasan	2 Dokumen	550.000.000	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepengawasan	2 Dokumen	550.000.000	
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	SKPD Inspektorat	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	- Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	SKPD Inspektorat	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	- Paket	-	
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	500.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	500.000.000	-
15	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	75 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	75 Orang	50.000.000	-
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	- Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	- Orang	-	Perlu Pagu Anggaran untuk Peningkatan SDM melalui Bimtek

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	770.833.340	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	770.833.340	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	-
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	-
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	80.000.000	Perlu Penambahan Pagu untuk Pencapaian Target
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.833.340	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.833.340	-
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	50.000.000	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Unit	15.461.784.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Unit	15.461.784.000	
23	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.200.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.200.000.000	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	261.784.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	261.784.000	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.004.775.404	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.004.775.404	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000	-
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.509.775.404	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.509.775.404	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	18 Unit	600.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	18 Unit	600.000.000	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	250.000.000	-
30	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	-
31	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	- Unit	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	- Unit	-	-
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	90,11 Persen	2.850.000.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	90,11 Persen	2.850.000.000	
			Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP	82,70 Persen	2.500.000.000			Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP	82,70 Persen	2.500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal	14 Laporan	4.750.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal	14 Laporan	4.750.000.000	
32	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	750.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	750.000.000	-
33	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	750.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	750.000.000	-
34	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	17 Laporan	750.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	17 Laporan	750.000.000	-
35	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	600.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	600.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	1.000.000.000	Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	1.000.000.000	-
37	Kerjasama Pengawasan Internal	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	100.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	100.000.000	-
38	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	800.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	800.000.000	-
10	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	15 Laporan	600.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	15 Laporan	600.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	100.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	100.000.000	-
40	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	500.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	500.000.000	Perlu Penambahan Pagu untuk Pencapaian Target
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	75- 100 Persen	1.850.000.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	75- 100 Persen	1.850.000.000	
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Laporan Ikhtisar Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Laporan	300.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Laporan Ikhtisar Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Laporan	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	150.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	150.000.000	-
42	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	150.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	150.000.000	-
12	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Urusan Pemerintah Daerah	56 Perangkat Daerah	1.550.000.000	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Urusan Pemerintah Daerah	56 Perangkat Daerah	1.550.000.000	
43	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	750.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	750.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	200.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	200.000.000	-
45	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	400.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	400.000.000	-
46	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	200.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	200.000.000	-
Jumlah					45.079.247.807	Jumlah					45.079.247.807

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sebagaimana Pasal 4 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sehingga tidak mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2. 4 TC – 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	Tidak ada

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program kegiatan dan jenis pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bila dikaitkan dengan Renstra Kementarian/Lembaga sangat relevan hal ini sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kebijakan Pengawasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman penganggaran kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 5 lima tahun. Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” dan Misi “Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara” maka ditetapkan tujuan yaitu “Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu, misalnya tahunan, semesteran, atau triwulanan.

Adapun sasaran untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

Menurunnya tingkat korupsi dan temuan mal administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan 4 sasaran strategis meliputi:

- 1) Meningkatkan kematangan pengendalian intern pemerintahan;
- 2) Meningkatkan mitigasi risiko dalam pelaksanaan penganggaran;
- 3) Meningkatkan pengendalian korupsi pada lingkup pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan Kapabilitas APIP.

Untuk target kinerja dengan uraian sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah.

Seluruh Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Unit Kerja, dan pegawai harus menerapkan semua unsur pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan SPIP. Penerapan SPI tersebut perlu terus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan evaluasi atas penerapan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, skor Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 3,371 sehingga memperoleh Level 3 (Terdefinisi). Capaian level tersebut adalah hasil dari penilaian pada beberapa komponen yaitu: 1) Penilaian atas komponen penetapan tujuan; 2) Penilaian atas komponen struktur dan proses; 3) Penilaian atas komponen pencapaian tujuan. Masing – masing komponen tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

a. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan.

1. Kualitas Sasaran Strategis Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor kualitas sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh skor 4 selama 2 tahun berturut – turut, namun masih memiliki beberapa Area of Improvement (AOI) yaitu:

- Masih terdapat kualitas indikator sasaran pada pemda dan perangkat daerah yang belum Specific, Measurable, Achievable, Realiable dan Timebound (SMART);

- Masih terdapat indikator kinerja yang belum cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pemerintah daerah sehingga menyebabkan target dari indikator tersebut juga tidak tepat;
- Terdapat target yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya (penetapan target di bawah capaian tahun sebelumnya).

2. Kualitas Pencapaian Sasaran Strategis.

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor kualitas sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh skor 3 pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 yang memperoleh skor 4, namun masih memiliki beberapa Area of Improvement (AOI) yaitu:

- Terdapat sasaran strategis OPD yang tidak selaras dengan sasaran di tingkat pemerintah daerah;
- Terdapat indikator sasaran strategis OPD yang tidak berorientasi hasil, tidak spesifik, dan tidak relevan;
- Masih terdapat sasaran dan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak berorientasi hasil;
- Terdapat target yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
- Belum semua perangkat daerah menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kualitas pengawasan melalui pendampingan dan asistensi terhadap mitra strategis dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan sasaran strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 sehingga berimplikasi pada peningkatan capaian kualitas penetapan sasaran strategis dan kualitas pencapaian strategis pada komponen penetapan tujuan maturitas SPIP terintegrasi.

b. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses.

Penilaian atas komponen struktur dan proses terdiri dari penilaian terhadap 5 unsur yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Risiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; 5) Pemantauan. Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah

memperoleh capaian skor 3 dalam 2 tahun berturut – turut pada 4 unsur yaitu 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Risiko; 3) Kegiatan Pengendalian; dan 4) Pemantauan. Sedangkan unsur Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,5 dan menjadi 3 pada tahun 2024. Namun masih terdapat beberapa Area of Improvement yaitu:

- perlu dibangun kebijakan antikorupsi yang komprehensif meliputi kebijakan, struktur pengelola risiko korupsi dan standar perilaku antikorupsi;
- risiko kemitraan belum dikelola dengan baik;
- saluran pengaduan belum berjalan dengan baik dan sistem whistleblowing cenderung rendah;
- belum adanya pedoman revidi yang terstandar;
- pimpinan perangkat daerah belum melakukan pemantauan secara berkala capaian kinerja dan pemantauan terhadap risiko.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan yang optimal dalam memastikan terwujudnya good governance di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat mendorong capaian pada komponen struktur dan proses maturitas SPIP terintegrasi.

c. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan.

Penilaian atas komponen penetapan tujuan terdiri dari penilaian terhadap 4 unsur yaitu: 1) Efektivitas dan efisiensi; 2) Keandalan laporan keuangan; 3) Pengamanan atas Aset; 4) Ketaatan pada peraturan.

1) Efektivitas dan Efisiensi.

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor efektivitas dan efisiensi atas capaian outcome memperoleh skor 3 selama 2 tahun berturut – turut, sedangkan efektivitas dan efisiensi atas capaian output mengalami kenaikan capaian dari skor 3 pada tahun 2023 menjadi skor 4 pada tahun 2024, namun masih memiliki beberapa Area of Improvement (AOI) yaitu:

- masih terdapat sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat yang tidak tercapai realisasinya;
- masih terdapat sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat daerah yang belum berorientasi hasil;
- terdapat OPD yang tidak menyajikan capaian output per kegiatan.

2) Keandalan Laporan Keuangan.

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor keandalan laporan keuangan memperoleh skor 3 atau C selama 2 tahun berturut – turut. Hal tersebut disebabkan masih terdapat beberapa temuan berulang pada hasil audit eksternal atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Area of Improvement atas komponen keandalan laporan keuangan maturitas SPIP terintegrasi.

3) Pengamanan atas Aset.

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor keandalan laporan keuangan memperoleh skor 3 atau C selama 2 tahun berturut – turut. Hal tersebut disebabkan masih terdapat beberapa temuan atas aset pada hasil audit eksternal atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Area of Improvement atas komponen keandalan laporan keuangan maturitas SPIP terintegrasi.

4) Ketaatan terhadap Peraturan.

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor ketaatan terhadap peraturan pada tahun 2023 memperoleh skor 3 atau C dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi skor 2 atau D. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya jumlah temuan ketidakpatuhan auditor eksternal pada LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan dalam bentuk quality assurance atas tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat mendorong capaian pada komponen struktur dan proses maturitas SPIP terintegrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan 3 strategi utama untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP terintegrasi yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Pencapaian Sasaran Strategis; 2) Peningkatan Kualitas Pengamanan Aset Daerah; 3) Penghapusan Temuan Berulang atas LKPD.

2. Manajemen Risiko Indeks.

Nilai Manajemen Risiko Indeks adalah ukuran yang mencerminkan tingkat kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis,

merespons, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategisnya. Indeks ini memberikan gambaran sejauh mana pendekatan manajemen risiko diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di dalam organisasi. Penilaian ini didasari oleh beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menekankan pentingnya manajemen risiko dalam tata kelola pemerintahan.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Maturitas SPIP, yang mencakup penilaian aspek manajemen risiko.

Nilai ini dihitung berdasarkan skor capaian elemen-elemen manajemen risiko yang meliputi:

- 1) Proses identifikasi risiko.
- 2) Analisis dan evaluasi risiko.
- 3) Penerapan mitigasi risiko.
- 4) Pemantauan dan pelaporan risiko.

Skor akhir biasanya dinilai dalam skala tertentu, misalnya 1–5, yang menggambarkan tingkat maturitas penerapan manajemen risiko.

3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi korupsi secara efektif. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pengendalian korupsi yang diterapkan organisasi. Penilaian ini didasari oleh beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Indeks ini dihitung berdasarkan evaluasi terhadap:

1. Kebijakan antikorupsi yang diterapkan.
2. Keberhasilan program pengendalian korupsi.
3. Tingkat kepatuhan pegawai terhadap pedoman etika.
4. Penanganan pengaduan korupsi.

Hasil evaluasi dirangkum dalam bentuk skor yang menunjukkan efektivitas pengendalian korupsi, biasanya dalam bentuk skala 1-100 atau kategori (misalnya: Baik, Cukup, atau Kurang).

4. Nilai Kapabilitas APIP.

Nilai Kapabilitas APIP adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kerangka kerja Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang diterapkan secara global. Penilaian ini didasari oleh beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang menekankan penguatan kapabilitas APIP.
- Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP.
- Peraturan Kepala BPKP Nomor 1634/K/D4/2019 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP.

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan berdasarkan enam elemen utama dalam IA-CM:

1. Layanan Audit: Kualitas layanan audit yang diberikan APIP.
2. Manajemen Proses Audit: Efektivitas proses audit yang diterapkan.
3. Manajemen Sumber Daya: Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia.
4. Arah Strategis dan Kepemimpinan: Strategi dan peran kepemimpinan dalam pengawasan.
5. Hubungan dan Budaya Organisasi: Sinergi APIP dengan stakeholders.
6. Struktur Tata Kelola: Peran APIP dalam tata kelola organisasi.

Setiap elemen diberi nilai pada skala tertentu (misalnya 1-5), yang kemudian dirata-rata untuk menentukan tingkat kapabilitas APIP (Level 1 hingga Level 5).

- Level 1 (Initial): Fungsi pengawasan bersifat reaktif dan belum terstruktur.

- Level 2 (Infrastructure): Fungsi pengawasan telah memiliki prosedur dasar.
- Level 3 (Integrated): Fungsi pengawasan terintegrasi dalam proses manajemen.
- Level 4 (Managed): Fungsi pengawasan memberikan nilai tambah strategis.
- Level 5 (Optimized): Fungsi pengawasan mencapai kinerja terbaik secara berkelanjutan.

Keempat indikator kinerja ini merupakan komponen penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi. Selain itu juga keempat indikator kinerja ini sebagai upaya Inspektorat Daerah dalam menyelaraskan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026 yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan.

4.1 Program Dan Kegiatan

4.1.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Pengawas Pengelolaan Pembangunan daerah telah merumuskan Program dan kegiatan periode tahun 2025 – 2029 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis yang telah ditetapkan dan juga merupakan salah satu pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dimana rumusan program dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Renja Kerja tahun 2026 ditetapkan 3 program yang telah disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terbagi atas Program Prioritas yang merupakan program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah, dan Program Penunjang sebagai program kegiatan yang menopang Program Prioritas.

4.1.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 telah merencanakan 2 (dua) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang. Adapun program tersebut sebagai berikut:

o Program Prioritas

Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.5.350.000.000 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.1.850.000.000 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan.

o Program Penunjang

Selain Program Prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga di dukung dengan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 37.879.247.807,- yang terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan.

4.1.3 Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Dalam rumusan Program dan Kegiatan pada penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 tidak terdapat ketidaksesuaian rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan maupun pagu indikatifnya.

4.1.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Untuk lebih jelas mengenai rincian Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel 4.1 (TC-33) dibawah ini.

Tabel 4. 1 TC – 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Inspektorat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76,99 Nilai	37.879.247.807			77,74 Nilai	49.313.417.346
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		6 Dokumen	350.000.000			7 Dokumen	450.000.000
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	150.000.000	APBD Kukar	-	2 Dokumen	150.000.000
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD Kukar	-	1 Laporan	50.000.000
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	100.000.000	APBD Kukar	-	3 Laporan	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kukar	-	1 Dokumen	50.000.000
6.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	- Berita Acara	-	APBD Kukar	-	1 Berita Acara	50.000.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		4 Laporan	18.051.055.063			4 Laporan	19.272.594.848
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	1176 Orang/ bulan	17.771.724.663	APBD Kukar	-	1778 Orang/ bulan	18.993.264.448
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD Kukar	-	1 Laporan	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	2 Laporan	204.330.400	APBD Kukar	-	2 Laporan	204.330.400
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kukar	-	1 Dokumen	25.000.000
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		3 Dokumen	90.800.000			3 Dokumen	115.800.000
6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kukar	-	1 Dokumen	50.000.000
6.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	25.000.000	APBD Kukar	-	1 Laporan	25.000.000
6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	1 Laporan	40.800.000	APBD Kukar	-	1 Laporan	40.800.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian		2 Dokumen	550.000.000			3 Dokumen	3.300.000.000
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	SKPD Inspektorat	- Paket	-	APBD Kukar	-	- Paket	-
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	25 Orang	500.000.000	APBD Kukar	-	100 Orang	1.500.000.000
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	75 Orang	50.000.000	APBD Kukar	-	75 Orang	300.000.000
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	- Orang	-	APBD Kukar	-	120 Orang	1.500.000.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 Layanan	770.833.340			6 Layanan	1.210.000.000
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	15.000.000	APBD Kukar	-	1 Paket	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	75.000.000	APBD Kukar	-	1 Paket	200.000.000
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	SKPD Inspektorat	3 Paket	80.000.000	APBD Kukar	-	3 Paket	250.000.000
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	50.833.340	APBD Kukar	-	1 Paket	60.000.000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	50 Laporan	500.000.000	APBD Kukar	-	50 Laporan	500.000.000
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	250 Dokumen	50.000.000	APBD Kukar	-	250 Dokumen	150.000.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23 Unit	15.461.784.000			56 Unit	20.250.000.000
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	SKPD Inspektorat	- Unit	-	APBD Kukar	-	2 Unit	800.000.000
6.01.01.2.07.0002	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	- Unit	-	APBD Kukar	-	3 Unit	1.000.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	SKPD Inspektorat	- Unit	-	APBD Kukar	-	1 Paket	2.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Unit	15.200.000.000	APBD Kukar	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Unit	15.200.000.000
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SKPD Inspektorat	22 Unit	261.784.000	APBD Kukar	-	50 Unit	1.250.000.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	2.004.775.404			12 Bulan	3.815.022.498
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	420.000.000	APBD Kukar	-	12 Laporan	805.247.094

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	75.000.000	APBD Kukar	-	12 Laporan	1.500.000.000
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	1.509.775.404	APBD Kukar	Menyesuaikan Keperluan Inspektorat untuk pemenuhan Tenaga Ahli dan Outsourcing (tenaga keamanan dan kebersihan)	12 Laporan	1.509.775.404
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara		18 Unit	600.000.000			20 Unit	900.000.000
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SKPD Inspektorat	6 Unit	250.000.000	APBD Kukar	-	6 Unit	250.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SKPD Inspektorat	11 Unit	250.000.000	APBD Kukar	-	11 Unit	250.000.000
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	SKPD Inspektorat	1 Unit	100.000.000	APBD Kukar	-	1 Unit	200.000.000
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	SKPD Inspektorat	- Unit	-	APBD Kukar	-	2 Unit	200.000.000
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindakan Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		90,11 Persen	2.850.000.000			90,20 Persen	6.150.000.000
		Persentase Tindakan Rekomendasi APIP		82,70 Persen	2.500.000.000			84,00 Persen	4.000.000.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal		14 Laporan	4.750.000.000			14 Laporan	8.500.000.000
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	5 Laporan	750.000.000	APBD Kukar	-	6 Laporan	1.500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	5 Laporan	750.000.000	APBD Kukar	-	10 Laporan	1.750.000.000
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	17 Laporan	750.000.000	APBD Kukar	-	17 Laporan	1.250.000.000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	600.000.000	APBD Kukar	-	5 Laporan	1.000.000.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	38 Laporan	1.000.000.000	APBD Kukar	-	39 Laporan	1.250.000.000
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Kesepakatan	100.000.000	APBD Kukar	-	3 Kesepakat an	250.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	800.000.000	APBD Kukar	-	4 Dokumen	1.500.000.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu		15 Laporan	1.650.000.000			19 Laporan	1.650.000.000
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	100.000.000	APBD Kukar	-	4 Laporan	150.000.000
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	13 Laporan	500.000.000	APBD Kukar	-	15 Laporan	1.500.000.000
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi		75-100 Persen	1.850.000.000			75-100 Persen	3.400.000.000
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Ikhtisar Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		2 Laporan	300.000.000			4 Dokumen	650.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Rekomendasi	150.000.000	APBD Kukar	-	1 Rekomendasi	250.000.000
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Rekomendasi	150.000.000	APBD Kukar	-	3 Rekomendasi	400.000.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Urusan Pemerintah Daerah		56 Perangkat Daerah	1.550.000.000			56 Dokumen	3.200.000.000
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	56 Perangkat Daerah	750.000.000	APBD Kukar	-	56 Perangkat Daerah	1.250.000.000
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	10 Perangkat Daerah	200.000.000	APBD Kukar	-	13 Perangkat Daerah	400.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Kegiatan	400.000.000	APBD Kukar	-	3 Kegiatan	800.000.000
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	10 Perangkat Daerah	200.000.000	APBD Kukar	-	10 Perangkat Daerah	300.000.000
	JUMLAH				45.079.247.807				62.863.417.346

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun langkah-langkah melalui tahapan kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode tahun ini yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) Konsultasi (*Consulting*) dan Pencegahan Korupsi (Anti Corruption) terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait early warning system (peringatan dini)
3. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan Konsultasi (*Consulting*) terhadap laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
4. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawas.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional pengawasan.
6. Mendorong stakeholder/masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti kaidah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan selanjutnya Renja ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun Anggaran 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Adapun strategi yang merupakan langkah sistematis yang ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar program dapat dilaksanakan demi tercapainya tujuan dan sasaran adalah :

1. Melakukan kegiatan Pengawasan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi.
2. Melakukan kegiatan konsultasi, pendampingan dan pembinaan.
3. Menyelenggarakan atau mengikutsertakan aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
4. Penyediaan peralatan dan bahan penunjang kinerja pengawasan.
5. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait peran serta pengawasan masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Kerja 2026 ini diharapkan pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan, serta nantinya dapat mengakomodasikan berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra.

Tenggarong, Juli 2025

Inspektur,


H. Heriansyah, SE., M.Si., CGCAE., CPSp
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponogoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fax. 661787 Tenggarong Kode Pos 75514

